

ABSTRAK

Salah satu hal yang dibutuhkan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana adalah alat bukti. Keberadaan alat bukti tidak dapat dilepaskan dalam proses pembuktian maupun dalam proses persidangan. Alat bukti telah mengalami perluasan dikarenakan suatu kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Alat bukti yang berkaitan dengan teknologi atau dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti petunjuk.

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis buat, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan dalam penulisan ini yakni bagaimana pengaturan personal chat sebagai alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dan UU ITE serta bagaimana dampak hukum personal chat sebagai alat bukti pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami pengaturan personal chat sebagai alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan UU ITE serta agar dapat mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan personal chat sebagai alat bukti setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016.

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data pada umumnya diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sumber penelitian dari bahan-bahan pustaka lazimnya disebut sebagai bahan data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah personal chat atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti apabila terdapat alat bukti lain sebagai pendukung yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan sepanjang hal tersebut diperoleh atas dasar permintaan dari kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata Kunci : Alat Bukti, Personal Chat , Pengaturan

ABSTRACT

One of the things needed in the process of proving a criminal case is evidence. The existence of evidence cannot be released in the evidentiary process or in the trial process. Evidence has expanded due to a rapidly developing technological advancement. Evidence relating to technology or which can be said to be electronic evidence is an extension of evidence evidence.

Based on the background that the author has made, the authors formulated several problems in this paper namely how to arrange personal chat as evidence contained in the Criminal Procedure Code and ITE Law and how the impact of personal chat law as evidence after the Constitutional Court Ruling No.20 / PUU - XIV / 2016.

The purpose of this paper is to understand the personal chat arrangement as evidence set out in the Criminal Procedure Code and the ITE Law and to be able to find out the legal impact caused by personal chat as evidence after the Constitutional Court Ruling No.20 / PUU-XIV / 2016.

This research approach method uses the normative juridical research approach. Data sources are generally obtained from library materials. Research sources from library materials are commonly referred to as secondary data material.

The conclusion of this research is personal chat or electronic information and / or electronic documents and / or printouts can be used as evidence if there is other evidence as supporting in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code and to the extent that it was obtained on the request of the police, prosecutors, and / or other law enforcement institutions and in accordance with existing laws and regulations.

Keywords: Evidence, Personal Chat, Settings